

3

Oleh: Darmanto

Kebijakan Afirmatif untuk Gerakan Literasi Televisi Menuju Masyarakat Informasi

Latar Belakang

Dunia pertelevisian Indonesia yang didominasi oleh siaran televisi swasta, ternyata lebih banyak menimbulkan efek negatif dari pada positifnya. Sebuah generasi baru bernama “generasi televisi” telah lahir sebagai anak kandung peradaban audio visual. Generasi baru itu lebih banyak menghabiskan waktunya di depan pesawat televisi, dan jemari tangannya pandai memainkan *remote control* untuk memilih acara yang mereka senangi secara *zig zag*. Daya ingatnya juga bagus ketika merekam informasi dari beberapa stasiun televisi dalam waktu yang relatif sama. Cita rasa mereka terhadap segala sesuatu yang lokal telah tergantikan oleh produk global dan pabrikan. Orientasi mereka terhadap kebudayaan nenek moyang yang adi-luhung telah tergantikan oleh budaya populer yang tidak mencerminkan kecerdasan (*geneously*), ketrampilan (*skill*), dan memiliki identitas (*identity*) kebangsaan.

Kondisi yang demikian mengundang keprihatinan banyak pihak. Bahkan orang-orang asing dari negara maju yang mengetahui

kualitas program dan program siaran televisi kita ikut prihatin, karena Indonesia dianggap negara yang paling liberal dan tidak mengindahkan etika sosial. Siaran televisi swasta yang menjadi agen dari budaya populer telah menggusur nilai-nilai keutamaan yang menjadi sumber pembangunan karakter masyarakat Indonesia selama ini. Siaran televisi swasta telah menceraibut hubungan psikologis rakyat Indonesia dengan kekayaan budaya yang dimilikinya. Wajar kalau banyak elemen bangsa ini yang resah atas kondisi riil yang kita hadapi saat ini.

Berdasarkan fakta empirik, suasana resah itu ternyata tidak hanya dialami oleh kalangan elit, tetapi juga sampai di lapis bawah. Bahkan dapat dikatakan, keresahan masyarakat mengenai pengaruh negatif siaran televisi sesungguhnya sudah masif. Dalam berbagai kesempatan *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara tentang masalah media, maupun pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, isu tentang dampak negatif siaran televisi selalu mengemuka. Dalam FGD di Kalimantan Barat yang pesertanya guru dan orang tua siswa muncul pendapat bahwa anak-anak sekarang cenderung lamban menjawab pertanyaan yang terkait dengan pelajaran sekolah, tetapi sangat fasih menghafal acara-acara televisi. Gejala adanya keresahan masyarakat terhadap sisi negatif siaran televisi ditemukan pula di tempat lain, baik di Jawa maupun luar Pulau Jawa (Darmanto, Kedaulatan Rakyat, 18/10/2007).

Secara umum kecenderungan untuk mengakses siaran televisi di mana pun memang terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, data Nielsen Media Research Tahun 2008 memperlihatkan bahwa penetrasi media televisi mengalami peningkatan dari 92% pada 2007 menjadi 94% di tahun berikutnya. Sedangkan pada periode waktu yang sama untuk jenis media lain menunjukkan kecenderungan adanya penurunan. Media radio turun dari 43% menjadi 41%, koran dari 23% menjadi 21%, majalah dari 17% tinggal 13%, tabloid dari 17% turun ke 14%, dan internet dari 12% menjadi 9% (Laporan Tahunan 2008, Komisi Penyiaran Indonesia: 41).

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan menguatnya peran media televisi tidak dapat dielakkan, terutama karena faktor ekonomi. Menurunnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk membeli koran, majalah, dan tabloid secara eceran maupun berlangganan. Itu sebabnya perkembangan tiras penerbitan di Indonesia tidak cukup signifikan. Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar (SPS)

sampai akhir 2007, oplah Surat kabar Harian baru mencapai 7.217.600 (Amir Effendi Siregar, 2009: 126). Jika dibanding jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta, berarti oplah surat kabar harian hanya 8,3%-nya. Dari total oplah yang ada itu pun, 60% beredar di di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Hanya 40% yang kemudian menyebar ke kota-kota kecil dan desa. Jadi, saat ini masih sangat jauh untuk bisa menjangkau separuh saja jumlah penduduk di Indonesia. Bahkan dari jumlah surat kabar yang sudah ada itu pun dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan gejala adanya penurunan oplah, terdesak oleh perkembangan media internet. Beberapa industri penerbitan sudah mengantisipasi gejala itu dengan melakukan diversifikasi, yakni membuka layanan multi media.

Faktor lain yang menyebabkan dominasi media televisi akan terus menguat di Indonesia adalah rendahnya minat baca masyarakat. Kebudayaan kita berkembang secara tidak linier seperti di negara maju yang melewati fase budaya lisan I, budaya tulis, dan baru kemudian budaya Lisan II (audio visual), tetapi meloncat dari Lisan I ke Lisan II sehingga tidak melewati fase budaya tulis yang berbasis membaca. Pola perkembangan kebudayaan yang demikian mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir logis, tidak sistematis, tradisi literasi rendah, dan hasilnya cenderung dangkal (Indra Tranggono, Kedaulatan Rakyat, 27/2/2010).

Mengingat dominasi televisi tidak dapat dibendung lagi, dan di sisi lain kualitas siaran televisi Indonesia terus menunjukkan kecenderungan menurun, maka diperlukan sikap kritis dari khalayak (*audiences*). Dengan demikian, masyarakatlah yang bertindak aktif melakukan seleksi program. Sebab, kita tidak dapat berharap banyak dari pelaku industri media televisi yang padat modal itu untuk selalu menyuguhkan program berkualitas tinggi (*high quality*). Bagaimana pun mereka adalah pebisnis, dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga menggariskan sifat dasar mereka sebagai mesin pencari uang. Jadi, wajar kalau industri media televisi tidak banyak memproduksi acara-acara berkualitas tinggi karena membutuhkan biaya besar, tetapi belum tentu mendatangkan iklan. Bagi mereka, lebih baik membuat acara yang sekedar mengundang tawa, berbiaya murah, tetapi pasti ditonton. Demikian pula kita tidak bisa mengharap peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan sensor program mengingat posisi lembaga itu

di hadapan industri media televisi sangat rendah. Jadi, solusinya tidak lain adalah mengembangkan sikap kritis masyarakat sehingga mereka makin berdaya.

Guna mengembangkan sikap kritis masyarakat terhadap media, kiranya perlu dilakukan kegiatan literasi. Kegiatan itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), meskipun sifatnya masih sporadis atau

parsial. Di masa mendatang, intensitas kegiatan itu perlu ditingkatkan dan disinergikan dengan berbagai pihak agar menjadi gerakan kultural. Sehubungan dengan itu maka dipandang perlu adanya kebijakan afirmatif dari Pemerintah guna mewujudkan kegiatan literasi menjadi gerakan kultural yang masif dan berskala nasional.

Pengertian Literasi

Bagi masyarakat kebanyakan di Indonesia, istilah literasi media ternyata masih tergolong asing.

Ketika organisasi Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta melakukan pelatihan literasi media untuk ibu-ibu di tujuh wilayah Desa/Kelurahan di Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, Provinsi DIY antara Oktober s.d Desember 2009, dilakukan pula penjajagan mengenai familiaritas mereka terhadap istilah "literasi". Dari 167 orang peserta yang diwawancari, ternyata lebih dari 90% di antara mereka menyatakan belum pernah mendengar istilah itu, apalagi memahami artinya. Maka dalam evaluasi bersama dengan para trainer diusulkan agar sebaiknya istilah "literasi media" diganti dengan kata "melek media" yang lebih familier. Usulan itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini masyarakat sudah akrab dengan penggunaan istilah "melek huruf, melek teknologi, melek budaya", dan lainnya sehingga akan lebih mudah menerangkan arti melek media.

Akan tetapi, mengingat berbagai teks yang ada masih menggunakan istilah literasi, maka dalam artikel ini pun secara konsisten digunakan kata tersebut, bukan "melek" seperti yang pernah diusulkan. Kata literasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris, "literacy" yang berarti kemampuan membaca dan menulis (*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, edisi ketujuh, 2005: 898). Namun, James Potter mendefinisikan, "Media literacy is more than these specialized abilities. It is something more general". Literasi media adalah suatu cara pandang atau kemampuan melakukan

interpretasi makna pesan dari media berdasarkan struktur pengetahuan yang telah kita miliki (Potter, 2001: 4). Sedangkan menurut *Center for Media Literacy* dalam Potter sebagaimana dikutip oleh Rianto (2009: 41) literasi media adalah suatu kerangka kerja untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan media. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikatakan David Considine, bahwa literasi media adalah lebih dari sekedar mengkonsumsi informasi, tetapi juga memberikan kemampuan memproduksi, mencipta dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media, tidak hanya terbatas pada media cetak (<http://www.ced.appstate.edu/departments/ci/programs/edmedia/medialit/article.html#What%20is%20Media%20Literacy>)

Mengacu pada sejumlah pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi media adalah kemampuan yang dimiliki konsumen media sehingga membuatnya selektif dalam memilih media, mampu memberikan tanggapan secara kritis, dapat menilai baik buruknya kinerja media, dan mampu menciptakan media alternatif sesuai kebutuhan mereka. Namun, sesuai dengan judul artikel, maka pembahasan mengenai isu literasi dalam kesempatan ini hanya terfokus pada televisi. Dalam konteks media televisi, maka individu yang *literated* tidak sekedar mampu memilih stasiun televisi dan program acara siarannya yang berkualitas, tetapi juga dapat merespon secara kritis isi program, mengevaluasi atau menilai, mengkomunikasikan hasil penilaian tersebut kepada pihak lain dan jika sifatnya aduan dapat menyampaikannya ke KPI/KPID, atau bahkan mengkampanyekan untuk memboikot tidak menonton program yang berkualitas rendah sembari menciptakan media alternatif.

Urgensi Gerakan Literasi

Bangsa Indonesia telah bersepakat memilih demokrasi sebagai sistem bernegara. Konsekuensinya adalah adanya jaminan kebebasan pers, atau kebebasan bermedia.

Dalam sistem demokrasi, negara tidak lagi melakukan kontrol terhadap isi media massa seperti halnya terjadi di era Orde Baru. Industri media cetak tidak lagi terikat pada politik perizinan yang dikelola oleh Negara, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Namun, untuk media massa elektronik (radio dan televisi) tetap tunduk pada politik perizinan karena beroperasi di ranah publik, yakni menggunakan frekuensi radio yang jumlahnya terbatas.

Konsekuensinya, ketika kebebasan bermedia tersebut tidak disertai dengan profesionalitas dan tanggung jawab sosial yang tinggi dari pelakunya, ternyata justru menimbulkan banyak masalah. Obyektivitas dan netralitas pemberitaan kini menjadi isu krusial yang tidak mudah dipecahkan. Terlebih lagi karena faktor kepemilikan media hanya ada di tangan beberapa gelintir orang, potensi terjadinya monopoli informasi tidak dapat dielakkan. Kondisi yang lebih memprihatinkan di negara ini karena sejumlah pemilik media adalah aktor politik yang juga mempunyai kepentingan ekonomi dan kekuasaan sehingga sering terjadi bias dalam pemberitaan suatu permasalahan.

Meskipun media televisi kita sering tergelincir dalam praktik pemberitaan yang melanggar etika, seperti kasus Temanggung oleh TV One (Agustus 2009) dan skandal Talkshow Makelar Kasus Palsu juga oleh TV One (24 Maret 2010), publik seperti tidak punya hak apa-apa. Atas nama kebebasan pers, pelaku media sepertinya abai terhadap hak-hak publik sehingga dengan seenaknya dilanggar. Padahal amanat konstitusi sangat jelas, bahwa hak kebebasan berkomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F tidak bersifat mutlak, tetapi juga harus tunduk pada kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J). Dalam kaitan itu, sesungguhnya wajar kalau Wakil Presiden Budiono perlu berkeluh kesah tentang ketidakberimbangan pemberitaan televisi swasta tentang kehidupan berbangsa dan

bernegara. Keluhan itu disampaikan ketika menghadiri Hari Ulang Tahun LKBN Antara, 14 Desember 2009 di Jakarta. Karena pemberitaan yang tidak berimbang akan membentuk persepsi yang keliru dan dapat merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam negara yang sudah mapan kehidupan berdemokrasinya, pelaku media dapat menempatkan diri secara tepat menjadi pilar keempat demokrasi. Mereka tidak semata-mata tunduk pada hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi etika sehingga nilai-nilai keutamaan senantiasa dikedepankan. Begitu juga pihak regulator dapat bekerja efektif karena didukung oleh iklim yang sehat. Lembaga sejenis KPI di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Australia dapat berfungsi efektif ketika melakukan pengawasan media. Jika ada media yang membandel pasti akan terkena sprit, dan jika pelanggarannya sudah keterlaluan maka segera dicabut izinnya.

Namun, kondisi di Indonesia sangat berbeda. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan representasi dari publik, ternyata tidak memiliki kekuatan apa-apa. Semua peringatan yang disampaikan KPI kepada industri penyiaran, meski selalu diperhatikan, tetapi tidak ditaati. Kasus penghentian Program Empat Mata di sebuah TV Swasta pada 4 November 2008, ternyata di kemudian hari program itu muncul lagi dengan nama Bukan Empat Mata, tetapi formatnya sama, tetapi tidak menjadi masalah dan sampai tahun 2010 acara tersebut masih eksis. Sekali lagi, hal itu membuktikan lemahnya regulator dalam melakukan pengawasan terhadap industri media. Di sisi lain, pemerintah yang sebenarnya masih ditakuti oleh pihak industri media, tidak juga melakukan teguran mengenai isi siaran karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Akibatnya, masyarakatlah yang harus menanggung derita. Masyarakat harus mampu memecahkan sendiri permasalahan dampak negatif dari siaran televisi. Dalam kondisi melemahnya kekuatan kontrol terhadap media itulah diperlukan sikap kritis masyarakat. Kita membutuhkan kondisi masyarakat yang betuli-betuli *literated* (melek media) agar mereka bisa menjadi kekuatan penyeimbang atas dominasi media. Sehubungan dengan itulah gerakan literasi media (televisi) dipandang penting untuk

dilakukan secara masif atau menasional.

Melalui gerakan literasi yang bersifat nasional, diharapkan masyarakat dapat semakin cerdas, kritis, dan memiliki posisi tawar kuat ketika berhadapan dengan media massa. Menguatnya posisi masyarakat diharapkan mampu mendorong kinerja media agar tetap pada koridor demokrasi. Kalau masyarakat sudah melek media, mereka akan mengambil inisiatif untuk melakukan

upaya-upaya kritis dan konstruktif agar kebebasan bermedia tetap terpelihara dengan baik, kebebasan pers tetap terjamin, dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi cita-cita bersama pun tetap terpelihara. Jika pengawasan terhadap media dilakukan sendiri oleh masyarakat tentu akan lebih sehat bagi kehidupan demokrasi, dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh negara.

Menjadikan Gerakan Kultural

Memasuki milinium ketiga, gerakan literasi televisi mulai muncul di sejumlah titik di Indonesia yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di Jakarta ada Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) yang secara konsisten melakukan gerakan literasi dengan target khalayak utama anak-anak dan melalui jalur pendidikan formal dengan harapan agar terjamin kesinambungannya. Sejak tahun 2006 YPMA mengkampanyekan Hari Tanpa Televisi (HTT) yang jatuh hari Minggu dekat dengan peringatan Hari Anak tanggal 23 Juli. Pada tahun 2008 YPMA melakukan uji coba literasi media di 35 SD, sedangkan tahun 2010 melakukan uji coba di 12 PAUD di Jogjakarta, Wonosobo, dan Klaten.

Di Semarang, lembaga yang fokus pada isu literasi televisi, antara lain adalah LeSPI. Sedangkan yang jumlahnya cukup banyak ada di Yogyakarta, yaitu ada Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Masyarakat Peduli Media (MPM), *Early Childhood Care Development Resource Centre (ECCD-RC)*, DPW Aisyiah, KPID, dan sejumlah jurusan/program studi Ilmu Komunikasi. Di dalam praksisnya, masing-masing lembaga mempunyai *target group* sendiri sehingga relatif bisa menjangkau semua kalangan.

Meskipun telah bermunculan gerakan literasi di kalangan masyarakat, tetapi masing-masing masih berjalan sendiri. Masing-masing lembaga memiliki agenda yang tidak terintegrasikan secara baik. Kerjasama yang dibangun pun masih bersifat temporer dan belum ada skema yang

matang. Kondisi demikian itu akibat belum adanya rencana besar (*grand design*) tentang gerakan literasi yang ingin diwujudkan di Indonesia. Faktor penyebabnya karena literasi media mungkin belum dianggap sebagai isu krusial sehingga dengan gampang diabaikan. Sejauh ini suara kalangan kampus mengenai pentingnya literasi masih kurang lantang, mungkin juga karena dianggap belum begitu penting. Apalagi dari kalangan birokrat, tampaknya belum banyak yang merasakan pentingnya gerakan literasi. Asumsi itu didasarkan pada minimnya pendapat yang telah dikemukakan oleh jajaran birokrat tentang literasi media.

Di samping itu, gerakan literasi media yang telah eksis sekarang ini masih terkesan elitis karena berbagai faktor. Pertama, sering munculnya gerakan literasi selalu berawal dari wilayah kota sehingga orang desa merasa tidak berkepentingan. Kedua, penggerak kegiatan itu umumnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang media, pendidikan anak, dan isu perempuan yang ketiga-tiganya relatif kurang populis dan jumlahnya tidak begitu banyak sehingga pesebarannya kurang luas. Ketiga, target khalayak kegiatan literasi umumnya masih sangat terbatas, terutama justru dari keluarga yang secara sosiologis dapat dikatakan menengah ke atas. Hal itu terjadi karena mereka telah memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya sikap kritis terhadap media sehingga sangat terbuka dalam menerima program literasi media. Keempat, subyek permasalahan yang disampaikan dalam kegiatan literasi antara lain perlunya "diet" menonton televisi ternyata tidak begitu mudah dapat diterima oleh semua pihak. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengalami keterbatasan sarana hiburan, nasihat untuk "diet" menonton televisi bukan persoalan

yang mudah untuk diikuti. "Kalau keluarga yang banyak duwit bisa saja diet tidak nonton TV, Mas...tetapi kalau orang seperti saya ini televisi menjadi satu-satunya hiburan, masak mau nonton saja pake dibatasi...?", kata seorang peserta pelatihan melek media di Yogyakarta Desember 2009 yang diselenggarakan oleh MPM. Kelima, belum adanya dukungan riil dari pemerintah, baik berupa dana maupun regulasi sehingga gerakan literasi masih dianggap sebagai kepentingan pihak LSM semata.

Selama kegiatan tersebut masih bersifat sporadis, belum tersinergikan secara baik, dan tidak dalam kerangka *grand design*, tentu sulit mengukur tingkat pencapaiannya dan pengaruh yang ditimbulkannya. Oleh karena itu perlu ada strategi agar kegiatan literasi yang selama ini bersifat sporadis, dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga, tidak tersinergikan secara baik, dan tidak memiliki *grand design* tersebut harus diupayakan menjadi gerakan kultural yang sifatnya masif dan berskala nasional. Gerakan literasi harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk menjaga ketahanan nasional dari infiltrasi budaya populer yang miskin tawaran nilai.

Gerakan literasi televisi yang baik dan berskala nasional diharapkan dapat mencapai tujuan, baik yang sifatnya individual (mikro) maupun yang makro. Tujuan mikro yang diharapkan dari kegiatan literasi televisi, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal memilih stasiun penyiaran dan/atau program acara televisi yang hendak ditonton;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersikap kritis ketika menonton siaran televisi sehingga dapat membedakan antara realitas media dengan realitas sosial;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan evaluasi atau menilai siaran/ tayangan program acara televisi;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengkomunikasikan hasil penilaian atas tayangan program yang dilihatnya;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan siaran dengan cara menyampaikan kritik, saran, dan aduan kepada KPI/KPID;
6. Membekali kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi diri dalam komunitas khalayak cerdas sehingga posisinya diperhitungkan oleh penyelenggara siaran televisi;
7. Membekali kemampuan masyarakat untuk melakukan kampanye boikot program televisi

yang tidak berkualitas;

8. Membekali kemampuan untuk menciptakan media alternatif sebagai bentuk perlawanan terhadap tayangan program berkualitas rendah.

Adapun tujuan makro atau yang sifatnya nasional untuk dicapai melalui gerakan literasi televisi, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai *stakeholder* dalam penyelenggaraan penyiaran televisi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pemilik frekuensi sehingga mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengawasi siaran televisi;
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap media televisi sebagai ruang publik sehingga secara sukarela ikut aktif menjaganya demi kepentingan bangsa dan negara;
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran media televisi sebagai media untuk menjaga ketahanan budaya Indonesia yang plural;
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran televisi dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran televisi dalam memelihara nilai-nilai universal (*share value*) yang menjadi perekat kehidupan bersama;
7. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran televisi untuk memertinggi kualitas demokrasi dan sistem otonomi daerah;
8. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran televisi untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
9. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pengembangan media yang berbasis nilai kepublikan.
10. Mendorong masyarakat untuk menciptakan media alternatif guna mengimbangi derasnya arus media komersial.

Perlu Peran Pemerintah

Gerakan literasi televisi yang berskala nasional akan dapat terwujud jika ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan untuk mendukung argumen perlunya campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan literasi berskala nasional.

pihak pimpinan. Apa yang dilakukan pimpinan akan cepat mengimbas ke lapis masyarakat di bawah. Biasanya mereka tidak mudah terpengaruh oleh contoh perbuatan baik yang datang dari orang dengan kelas sosial sama.

Kedua, walau pun banyak kritik yang ditujukan pada Pemerintah, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia masih menempatkan Pemerintah pada posisi sentral dalam kaitan dengan penanganan permasalahan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sepanjang tidak kontroversial, besar kemungkinannya terlaksana. Apalagi untuk jenis kebijakan yang lembut (*soft*) dan bertujuan melindungi kepentingan warga, sudah tentu akan diterima dan diimplementasikan. Jika kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat, otomatis luas jangkauan implementasinya akan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, posisi Pemerintah di hadapan pelaku industri televisi masih sangat kuat. Dengan demikian, meskipun misalnya, kebijakan afirmatif tentang gerakan literasi media dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi televisi swasta, mereka tentu tidak akan menolak secara frontal. Bagaimana pun mereka akan menghindari jangankan sampai izin penyiaran yang sudah dimiliki itu nantinya tidak diperpanjang karena membangkang aturan pemerintah.

Keempat, Pemerintah memiliki kaki tangan sampai di level paling bawah seperti RT/RW, dan jaringan kerja sangat luas. Dengan demikian begitu Pemerintah berhasil membuat suatu kebijakan maka mesin birokrasi akan berjalan dengan sendirinya. Informasi kebijakan yang telah dibuat akan mengalir sampai di masyarakat lapis bawah dan dapat berlangsung secara simultan untuk semua wilayah Indonesia.

Kelima, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk merencanakan dan mengajukan anggaran kepada pihak legislatif guna mencapai tujuan kebijakan. Dengan tersedianya anggaran, maka kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan. Berbeda halnya jika gerakan literasi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sudah tentu akan menghadapi banyak kesulitan pembiayaan. Selama ini kebanyakan program literasi yang ditangani kalangan LSM dapat berlangsung karena adanya dukungan dana dari pihak lain. Oleh sebab itu kesinambungan program sering tidak selalu bisa diharapkan.

Pertama, kultur masyarakat Indonesia masih tetap paternalistik meskipun secara politik memilih sistem demokrasi. Dalam lingkungan sosial yang paternalistik, dinamika masyarakat sangat dipengaruhi oleh teladan yang ditampilkan

Tipe dan Bentuk Kebijakan

Dalam analisis kebijakan dikenal adanya tiga tipe kebijakan, yaitu: kebijakan domestik, kebijakan Pertahanan Keamanan dan Luar negeri, dan kebijakan krisis.

Kebijakan domestik terdiri dari empat jenis, yaitu: *distributive, competitive regulatory, protective regulatory*, dan *redistributive* (Sofian Efendi, 2007). Mengacu pada kerangka pikir tersebut, kebijakan Pemerintah mengenai gerakan literasi media dapat dikategorikan ke dalam tipe kebijakan domestik jenis *protective regulatory*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh negatif siaran televisi.

Adapun bentuk kebijakan yang dapat diambil bisa dari yang sifatnya ekstrim, moderat sampai ke yang lembut. Dalam bentuk yang ekstrim misalnya, adanya kebijakan untuk memasukkan materi literasi media menjadi bagian dari kurikulum sekolah, terutama dari PAUD sampai dengan Sekolah Dasar. Bentuk kebijakan seperti ini dikatakan ekstrim karena pelaksanaannya akan bisa serentak di seluruh Indonesia dan betul-betul mengakar. Perubahan akan benar-benar terjadi secara masif dan sistematis karena dikendalikan oleh kurikulum. Peluang untuk dimasukkannya materi literasi media ke dalam kurikulum sekolah formal sebenarnya sangat besar. Saya rasa, materi literasi media akan jauh lebih kontekstual dan berguna bagi anak-anak SD dari pada mereka dipaksa menghafal materi pelajaran tentang sistem ketatanegaraan, politik, maupun ekonomi yang masih amat abstrak bagi anak usia itu. Mungkin atau tidaknya terhadap pilihan jenis kebijakan seperti usulan ini sangat ditentukan oleh kemauan politik dari Menteri Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, kebijakan yang tergolong moderat. Ada banyak bentuk kebijakan yang dapat diambil terkait dengan jenis yang moderat. Misalnya kebijakan yang sifatnya langsung pada sasaran, pemerintah dapat menetapkan literasi media sebagai kegiatan ekstra kurikulum untuk semua jenis tingkatan sekolah. Atau bisa juga menjadikan literasi sebagai salah satu pilihan materi untuk kurikulum muatan lokal. Bentuk kebijakan lain misalnya, menjadikan literasi sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dengan kegiatan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Dengan cara ini kegiatan literasi akan menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Mengingat implementasinya terkait langsung dengan sekolah maka kebijakan yang sifatnya ekstrim dan moderat ini harus dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Pilihan terakhir, kebijakan yang sifatnya soft adalah dengan cara menyediakan insentif bagi kelompok masyarakat, LSM, maupun lembaga lain yang melakukan literasi. Insentif dapat berupa dana, maupun bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan literasi. Namun, bentuk kebijakan ini besar kemungkinan tidak akan efektif karena tidak adanya unsur "paksaan" di level implementasi, dan tidak ada rencana besarnya yang menjadi acuan. Di samping itu, program insentif sering sekali mengundang bias. Ada saja pihak yang sebenarnya tidak mempunyai kompetensi dan komitmen untuk melakukan literasi, tetapi karena tergiur untuk mendapatkan insentif lantas mengada-adakan program tersebut.

Kelebihan dari pilihan bentuk kebijakan yang diusulkan terakhir ini adalah fleksibel sehingga dapat dimulai kapan saja, dan tidak membutuhkan negosiasi politik yang panjang. Kebijakan yang satu ini dapat dilakukan oleh banyak Kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya. Kebijakan itu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun terkoordinasikan dalam satu pintu.

Penutup

Dalam seminar bertema “Menyelamatkan TVRI, Menyelamatkan Ruang Publik Pluralisme” di Yogyakarta 10 April 2010, Garin Nugroho mengingatkan pentingnya membangun televisi sebagai strategi komunikasi dalam berbangsa dan bernegara, serta menjadikan televisi sebagai bagian dari strategi kebudayaan nasional. Gagasan besar itu dapat terwujud kalau semua elemen bangsa ini memiliki persepsi dan apresiasi yang sama mengenai televisi sebagai media untuk membangun kehidupan bernegara sebagaimana telah disepakati oleh para pendiri (*Founding Fathers*). Selama ini sikap kritis terhadap media masih dimonopoli oleh kalangan tertentu, terutama masyarakat kampus, dan lapis menengah ke atas. Sedangkan pada level akar rumput yang merupakan *silent majority* kemampuan literasinya masih rendah.

Guna mewujudkan kesamaan persepsi dan apresiasi semua elemen, maka dipandang perlu adanya gerakan literasi televisi yang sifatnya masif berskala nasional. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat di semua level, agar kemudian memiliki daya tawar tinggi di hadapan pelaku industri televisi.

Penguatan di level masyarakat melalui gerakan literasi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Meningkatnya kemampuan literasi media pada level masyarakat akan menjadikan mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja media secara profesional dan jauh dari anarkisme.

Gagasan menjadikan kegiatan literasi media sebagai gerakan kultural yang masif dan berskala nasional hanya akan terwujud jika ada kebijakan afirmatif dari pemerintah. Dengan kewenangan dan kekuatan yang dimiliki, Pemerintah sesungguhnya dapat membuat kebijakan afirmatif baik yang sifatnya radikal, moderat, maupun lembut. Dari sejumlah pilihan itu mana yang akan diambil, keputusan akhirnya akan sangat ditentukan oleh suasana lingkungan yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan, dan kepentingan politik yang ingin diperjuangkan oleh para pengambil kebijakan. Namun, sebaik-baiknya kebijakan adalah yang sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan mayoritas elemen bangsa, dan memiliki visi jauh ke depan demi ketahanan nasional, NKRI.

